

# Komparasi Pemberlakuan SNI dan Batik *Mark* Sebagai Upaya Perlindungan IKM Batik Pandono di Laweyan Surakarta

Arisa Dwi Pangestu<sup>\*1</sup>, Fakhrina Fahma<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Teknik Industri, Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta,  
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta, 57126, Indonesia  
Email: arissadwi@student.uns.ac.id<sup>1</sup>, fakhrinafahma@staff.uns.ac.id<sup>2</sup>

## Abstrak

Batik merupakan suatu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran batik – batik tiruan semakin banyak di pasaran. Permasalahan lain yaitu adanya klaim batik dari negara lain. Sehingga, hal ini mendorong kepada penggiat IKM batik untuk melakukan perlindungan ekstra, salah satunya yaitu dengan adanya sertifikasi Batik pada produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan komparasi sertifikasi antara sertifikasi SNI dengan pelabelan batik *mark*. Komparasi ini dilakukan guna mempermudah IKM batik dalam menentukan sertifikasi yang sesuai dengan keadaan IKM saat ini dan dapat memberikan hasil yang optimal sebagai upaya perlindungan IKM Batik Pandono. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara yang diolah menggunakan *checklist*. Sehingga, diperoleh hasil bahwa pada masing – masing sertifikasi memiliki tujuan yang berbeda, namun pelabelan batik *mark* dinilai lebih mudah diterapkan oleh IKM Batik Pandono dalam waktu dekat ini sesuai dengan kondisi IKM saat ini.

**Kata kunci:** Batik, Batik *Mark*, IKM, SNI

## Abstract

*Batik is an Indonesian cultural heritage that is recognized by UNESCO as a world heritage. Along with the times, the presence of artificial batik is increasingly on the market. Another problem is the existence of batik claims from other countries. Thus, this encourages for IKM Batik to take extra protection, one of which is the existence of Batik's certification. This study aims to provide a certification comparison between SNI certification and batikmark labeling. This comparison is carried out to make it easier for IKM Batik to determine certifications that are in accordance with the current state of IKM and can provide optimal results as an effort to protect IKM Batik Pandono. This study used direct observation and interviews which were processed using a checklist. Thus, the result is that each certification has a different purpose, but batikmark labeling is considered easier to apply by IKM Batik Pandono in the near future in accordance with the current conditions of IKM.*

**Keywords:** Batik, Batik *Mark*, IKM, SNI

## 1. Pendahuluan

Batik merupakan suatu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada bulan Oktober 2009 (Fahma dkk, 2019). Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran batik – batik tiruan semakin banyak. Sehingga, hal tersebut menjadi tugas dari Kementerian Perindustrian dan masyarakat Indonesia untuk menjaga warisan budaya ini.

Beberapa pelaku IKM menyatakan bahwa perlunya adanya standar dan juga penilaian kesesuaian pada suatu produk yang dihasilkan. Adanya standar dalam perindustrian akan mempermudah suatu produk atau jasa untuk masuk ke dalam pasar dan masyarakat secara global (Perwitasari dkk, 2019). Masyarakat merupakan konsumen yang berwenang memberikan informasi

mengenai baik maupun buruknya produk atau jasa serta kesesuaian produk atau jasa dengan persyaratan dalam regulasi yang telah ditentukan. Suatu standar dapat melindungi konsumen dari perdagangan produk atau jasa yang spesifikasi mutunya tidak jelas, selain itu juga membantu kemudahan dalam transaksi perdagangan baik antara industri dengan pedagang besar maupun antar pedagang besar dengan pengecer, serta antara pedagang pengecer dengan seorang konsumen (Perwitasari dkk, 2019).

Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik tersebar di seluruh Indonesia. IKM juga memiliki peran yang penting dalam mendistribusikan hasil – hasil karya usaha masyarakat. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian mengharapkan pelaku IKM supaya tetap memerhatikan standar produksi

<sup>1</sup>\*Penulis Korespondensi

Diterima 27 Juni 2021; Diterima dalam bentuk revisi 28 Agustus 2021; Disetujui 6 Oktober 2021

guna meningkatkan daya saing di pasar global (Alhusain, 2015). Dalam hal tersebut, standar digunakan sebagai syarat untuk meningkatkan daya saing serta mutu produksi dari produk atau jasa suatu IKM, sehingga agar dapat diterima dan bersaing dengan produk global, maka produk – produk local khususnya tingkat IKM harus memprioritaskan estándar serta kualitas produksinya (Alhusain, 2015).

IKM bukan hanya sebagai pedagang yang menjalankan usaha, namun suatu IKM harus bersandar kepada standar yang telah ditetapkan (Setiawan dkk, 2018). IKM di Indonesia dinilai masih kurang bersaing dikarenakan belum banyak IKM yang menerapkan sertifikasi SNI maupun sertifikasi sejenis lainnya. SNI dalam penerapannya di bidang penjualan ataupun pemasaran sangat meningkatkan daya saing dari produk perusahaan, sehingga dengan hal tersebut memudahkan pemasaran dengan adanya mutu produk yang terjamin (Perwitasari dkk, 2019). Penerapan SNI memungkinkan perusahaan melakukan penyederhanaan dalam proses operasional pada semua tingkatan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meminimalkan kecelakaan kerja. (Perwitasari dkk, 2019). Oleh karena itu, diperlukannya suatu sertifikasi sebagai pedoman bagi produsen untuk memproduksi batik yang berkualitas dan untuk melindungi konsumen supaya mendapatkan produk yang berkualitas serta sebagai pedoman bagi laboratorium uji (Setiawan dkk, 2018).

Sertifikasi produk adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dibangun untuk memberikan kepercayaan konsumen, regulator, industri, dan pihak lain yang berkepentingan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk misalnya kinerja, keamanan, interoperabilitas, dan berkelanjutan produk (SNI ISO.IEC 17067:2013). Produk yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang relevan dapat diberi tanda kesesuaian. Manfaat dari adanya spesifikasi produk yaitu adanya pemastian dari pihak ketiga bahwa produk telah melalui pengujian, pengendalian, dan pengawasan yang efektif; konsumen terlindungi untuk mendapatkan produk yang bermutu; produk telah memenuhi persyaratan standar bagi produk wajib SNI; meningkatkan daya saing terhadap produk non-*standard*; dan meningkatkan efisiensi melalui penerapan sistem mutu yang efektif.

Permasalahan lain seputar batik adalah adanya klaim dari negara lain. Selain itu, dalam perkembangannya penerapan standar oleh IKM menemui beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah IKM yang berminat menerapkan standar, proses sertifikasi yang tidak mudah dan besarnya biaya pengujian atau sertifikasi yang dinilai mahal dan bersifat menambah biaya produksi (Meylani dkk, 2012). Hal ini mendorong kepada penggiat IKM batik untuk melakukan perlindungan ekstra dari berbagai upaya klaim, pencurian motif batik, dan maraknya *printing* batik. Selain itu,

sertifikasi batik dapat juga dilakukan melalui pelabelan Batik *Mark*. Batik *Mark* melekat pada batik asli Indonesia, walaupun pada kenyataannya masih banyak perajin batik di Indonesia yang belum mengenal atau belum mendaftarkan produknya untuk dilabeli Batik *Mark* (Sari dkk, 2019). Batik *Mark* merupakan suatu gagasan dari Departemen Perindustrian dan Balai Besar Kerajinan Batik yang dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2007, Kepmen ini bersifat sukarela bagi pengusaha maupun perajin batik (Sari dkk, 2019).

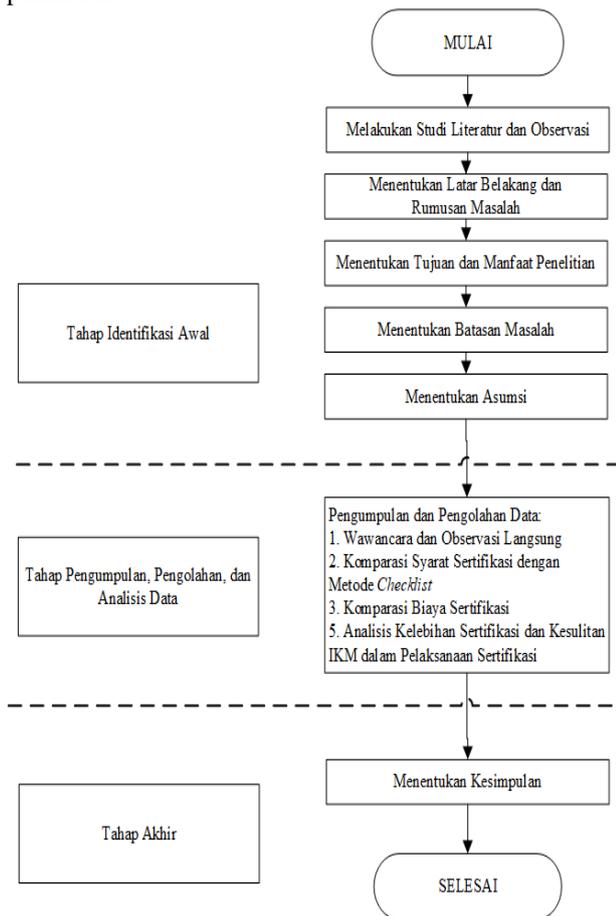
Namun, tak disangka dengan adanya *Coronavirus Disease* atau Covid-19 yang hadir pada bulan Maret 2020 di Indonesia, menimbulkan dampak yang besar di berbagai lini terutama dalam bidang ekonomi (Sholikhah dkk, 2020). Kementerian Keuangan RI menjelaskan pada bulan April 2020 dampak Covid-19 merambat pada sektor industri pengolahan dan berlanjut pada sektor ekonomi usaha kecil (Sholikhah dkk, 2020). Kemenkop dan UKM menyebutkan sebanyak 37.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak Covid-19 dengan rincian 56% penurunan penjualan, 22% permasalahan pada pembiayaan, 15% kesulitan dalam mendistribusikan barang, dan 4% kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Sholikhah dkk, 2020). Kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan kekhawatiran terhadap keberlangsungan UMKM maupun IKM pada berbagai daerah di Indonesia.

Keadaan pandemi akibat Covid-19 mengakibatkan salah satu IKM batik di Surakarta, yaitu IKM Batik Pandono harus mempertimbangkan ulang apakah ingin memberlakukan sertifikasi SNI atau pelabelan Batik *Mark* dikarenakan kondisi IKM yang terkena dampak dari Covid-19 tersebut. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan komparasi atau perbandingan sertifikasi antara sertifikasi SNI dengan pelabelan Batik *Mark*. Komparasi ini dilakukan guna mempermudah IKM batik dalam menentukan sertifikasi yang sesuai dengan keadaan IKM saat ini dan yang dinilai optimal sebagai upaya perlindungan IKM Batik Pandono kedepannya.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan perwakilan IKM Batik Pandono dan melakukan observasi langsung ke tempat produksi. Komparasi syarat sertifikasi dilakukan dengan menggunakan metode *checklist* supaya memudahkan hasil perbandingan. Selanjutnya, dilakukan komparasi biaya perkiraan dari sertifikasi SNI dan pelabelan Batik *Mark*. Terakhir, dilakukan analisis kelebihan dari masing – masing sertifikasi beserta analisis kesulitan IKM dalam proses pelaksanaan sertifikasi SNI maupun pelabelan Batik *Mark*. Tahapan metode penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1.

Berikut merupakan *flowchart* metodologi penelitian.



**Gambar 1.** *Flowchart* Metodologi Penelitian

Tahap yang pertama yaitu identifikasi awal merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Aktivitas yang dilakukan pada tahap identifikasi awal penelitian meliputi studi literatur dan observasi, identifikasi latar belakang dan rumusan masalah, penentuan tujuan dan manfaat penelitian, penentuan batasan masalah, dan penentuan asumsi penelitian. Pada tahap pertama yaitu studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat secara teoritis untuk menunjang penyelesaian masalah yang akan diangkat sehingga masalah yang diangkat tidak dianggap subjektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Studi literatur ini dilakukan dengan membaca dari beberapa sumber seperti paper, internet, maupun sumber materi lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual dari objek penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran awal penelitian. Observasi dilakukan secara langsung yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam membuat latar belakang dan perumusan masalah.

Kemudian, identifikasi terhadap masalah dilakukan untuk menentukan latar belakang merupakan gambaran dari situasi dan gejala masalah yang diamati dan dipelajari sehingga permasalahan tersebut dapat

digambarkan secara tepat sehingga dihasilkan penyelesaian secara cermat dan lengkap. Identifikasi masalah merupakan hasil dari observasi dan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Masalah didalam penelitian ini yaitu membandingkan dua sertifikasi yaitu sertifikasi SNI dan pelabelan Batik *Mark* sesuai kondisi IKM saat ini, sebagai perlindungan produk batik yang semakin marak munculnya batik tiruan. Latar belakang masalah tersebut digunakan untuk membuat rumusan masalah penelitian. Sehingga, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membandingkan dua persyaratan sertifikasi untuk perlindungan IKM Batik Pando di Laweyan Surakarta.

Selanjutnya, penentuan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu melakukan perbandingan dari dua jenis sertifikasi batik yaitu SNI dan Batik *Mark* untuk pemberlakuan sertifikasi sebagai upaya perlindungan IKM Batik Pando di Laweyan Surakarta serta menyesuaikan sertifikasi dengan jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kondisi IKM. Sementara itu, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu menjadi informasi maupun referensi pemilihan jenis sertifikasi yang nantinya dapat meningkatkan perlindungan terhadap IKM Batik di Indonesia dan meningkatkan minat penggiat IKM Batik di Indonesia dalam mengimplementasikan sertifikasi terhadap produk batik yang dihasilkan oleh IKM.

Pada penelitian ini dilakukan penentuan batasan masalah. Terdapat tiga batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan masalah yang pertama yaitu SNI Batik Tulis (SNI 8302:2016). Batasan kedua yaitu pelabelan Batik *Mark* yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-/IND/PER/9/2007. Batasan ketiga yaitu objek penelitian yaitu berada pada IKM Batik Pando di Laweyan Surakarta. Sedangkan, untuk asumsi penelitian memiliki dua asumsi. Asumsi pertama yaitu peraturan sertifikasi tidak berubah dari tahun diterbitkannya hingga dilakukan penelitian saat ini. Asumsi kedua yaitu SDM yang dimiliki IKM memiliki kemampuan standar untuk melakukan implementasi sertifikasi batik pada IKM tersebut.

Tahap yang kedua yaitu pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Pada tahap ini dilakukan beberapa tahapan, meliputi wawancara dan observasi langsung, komparasi syarat sertifikasi dengan metode *checklist*, komparasi biaya sertifikasi, serta analisis kelebihan sertifikasi dan kesulitan IKM dalam pelaksanaan sertifikasi. Langkah pertama yaitu melakukan wawancara kepada pihak perwakilan IKM Batik Pando dan observasi langsung di lokasi produksi IKM Batik Pando. Sehingga, dari kegiatan tersebut didapatkan beberapa data perusahaan meliputi jenis industri, profil perusahaan, dan status keanggotaan. Langkah kedua yaitu melakukan komparasi syarat sertifikasi dengan metode *checklist* melalui wawancara secara langsung sehingga memudahkan perbandingan

antara kedua syarat sertifikasi yang telah dimiliki oleh IKM. Langkah ketiga yaitu komparasi biaya sertifikasi yang didapatkan sumber dari LSPro dan Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) pada Kementerian Perindustrian. Langkah terakhir yaitu analisis kelebihan sertifikasi dan kesulitan IKM dalam proses pelaksanaan sertifikasi. Sehingga, dari komparasi dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditentukan sertifikasi yang akan digunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang menyesuaikan kondisi IKM.

Tahap yang ketiga yaitu merupakan tahap akhir. Pada tahap ini dibuat kesimpulan dari pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai profil IKM, status keanggotaan IKM, spesifikasi objek sertifikasi, bahan baku dan bahan penolong, proses produksi, komparasi syarat sertifikasi, komparasi syarat biaya sertifikasi, analisis kelebihan dari masing – masing sertifikasi beserta analisis kesulitan IKM dalam proses pelaksanaan sertifikasi SNI maupun pelabelan Batik *Mark*.

#### 3.1. Profil IKM Batik

Subbab ini membahas mengenai profil IKM Batik Pandono. Berikut adalah profil dari IKM Batik Pandono.

Nama UKM	: Batik Pandono
Bentuk Usaha	: Industri Kecil Menengah
Nama Pemilik	: Pandono
Alamat UKM	: Laweyan RT 02/02, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Jumlah Tenaga Kerja	: 14 orang

#### 3.2. Status Keanggotaan IKM

Subbab ini membahas mengenai status keanggotaan IKM Batik Pandono dalam sentra batik di Laweyan, Surakarta. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, IKM Batik Pandono telah terdaftar dalam organisasi pengrajin batik, yaitu pada forum yang bernama “Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan” atau biasa disingkat dengan FPKBL.

#### 3.3. Spesifikasi Objek Sertifikasi

Subbab ini membahas mengenai spesifikasi dari objek yang akan dilakukan sertifikasi. Berikut adalah data spesifikasi produk pada IKM Batik Pandono.

Nama Produk	: Batik Tulis Abstrak
Jenis Produk	: Kain lembaran
Ukuran Produk	: Lembaran 200x110cm
Merek Dagang	: Batik Pandono Abstrak

#### 3.4. Bahan Baku dan Bahan Penolong

Subbab ini membahas mengenai uraian bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi IKM Batik Pandono, sebagai berikut.

##### a) Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan yaitu kain mori (Sutra/primisma/prima), malam batik, zat pewarna remasol, dan pengunci warna/*waterglass*

##### b) Bahan Penolong

Bahan penolong yang digunakan yaitu kertas koran untuk alas dalam proses pembatikan.

### 3.5. Proses Produksi

Subbab ini membahas mengenai peralatan produksi yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan pada IKM Batik Pandono. Peralatan produksi yang digunakan meliputi canting batik, gawangan, kuas, bak cuci, wajan, serta kompor malam dan kompor ngeloret.

Proses produksi pembuatan kain batik abstrak terdiri dari 16 tahapan proses produksi, diantaranya sebagai berikut.

- Mempersiapkan kain
- Mencuci bersih kain
- Menjemur kain
- Menggambar pola batik pada kain
- Membatik menggunakan malam tahap pertama, disesuaikan dengan motif dan warna yang akan dibuat
- Mewarnai kain atau pola tahap pertama, yaitu dengan menggunakan warna dengan gradasi kecil (warna muda)
- Mengunci hasil pewarnaan dengan *waterglass* tahap satu
- Mencuci bersih kain untuk menghilangkan *waterglass* tahap satu
- Menjemur kain hingga cukup kering
- Membatik menggunakan malam tahap kedua, disesuaikan dengan motif dan warna yang akan dibuat
- Mewarnai kain atau pola tahap kedua, yaitu menggunakan warna dengan gradasi besar (warna tua)
- Mengunci hasil pewarnaan kedua dengan *waterglass* tahap dua
- Mencuci bersih kain untuk menghilangkan *waterglass* tahap dua
- Merebus kain agar malam batik hilang, proses ini biasa disebut dengan ngeloret malam
- Menjemur kembali kain batik
- Melakukan proses pengepakan atau *packaging* kain untuk didistribusikan ke pasaran

### 3.6. Komparasi Syarat Sertifikasi

Subbab ini membahas mengenai komparasi dari syarat sertifikasi SNI dan pelabelan Batik *Mark* yang nantinya dapat dipertimbangkan oleh IKM Batik Pandono dalam memilih sertifikasi mana yang sesuai dengan kondisi IKM pada saat ini. Komparasi syarat sertifikasi batik antara sertifikasi SNI dan pelabelan *Batikmark* ditampilkan pada Tabel 1.

Berikut merupakan tabel komparasi syarat sertifikasi batik pada penelitian ini.

Tabel 1. Komparasi Syarat Sertifikasi Batik

Jenis Persyaratan	Kode Persyaratan	Persyaratan	Metode Pemenuhan	Hasil Periksa		Sertifikasi Batik	
				SNI	Batikmark	SNI	Batikmark
<b>PERSONAL (A)</b>	A1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Diajukan	✓	✓	1	1
	A2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi	Diajukan	✓	✓	2	2
	B1	Formulir Pendaftaran	Diajukan	✓	✓	3	3
	B2	Daftar Isian Pemohon	Diisi	✓	✓	4	4
<b>COMPANY (B)</b>	B3	Profil Perusahaan	Dibuat	-	-	5	-
	B4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha	Diajukan	-	-	6	5
	C1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Diajukan	✓	-	7	-
	C2	Izin Usaha Industri (IUI)	Diajukan	-	-	8	-
<b>MANAGERIAL (C)</b>	C3	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diajukan	-	-	-	6
	C4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Diajukan	✓	-	9	-
	C5	Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek	Diajukan	✓	✓	10	7
	C6	Contoh Merek dan Lukisan	Diajukan	-	✓	-	8
<b>TECHNICAL (D)</b>	D1	Foto Produk	Dibuat	-	-	11	-
	D2	Dokumen Mutu	Dibuat	-	-	12	-
	D3	Diagram Alir Produksi	Dibuat	-	-	13	-
	D4	Sertifikat Uji Kesesuaian Batik	Diajukan	-	-	14	-

Berdasarkan pada tabel komparasi syarat sertifikasi batik, didapatkan beberapa perbedaan syarat yang harus dipenuhi oleh IKM Batik apabila akan melakukan sertifikasi standar produk batik pada IKM Batik. Persyaratan pada sertifikasi SNI batik meliputi syarat *personal* (A1 dan A2), *company* (B1, B2, B3, dan B4), *managerial* (C1, C2, C4, dan C5), serta *technical* (D1, D2, D3, dan D4). Sedangkan, untuk persyaratan pada pelabelan *batikmark* meliputi syarat *personal* (A1 dan A2), *company* (B1, B2, dan B4), serta *managerial* (C3, C5, dan C6).

Pada *checklist* pemenuhan syarat sertifikasi SNI masih terdapat 7 dari 14 persyaratan yang belum dimiliki diantaranya yaitu profil perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usaha, Izin Usaha Industri (IUI), foto produk, dokumen mutu, diagram alir produksi, dan sertifikasi uji kesesuaian batik. Sedangkan, pada *checklist* pemenuhan syarat pelabelan Batik *Mark* masih terdapat 2 dari 8 persyaratan yang belum dimiliki diantaranya yaitu profil perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sehingga, didapatkan perbedaan bahwa persyaratan *batikmark* dapat terbilang lebih sederhana untuk jangka pendek dibandingkan dengan persyaratan SNI yang membutuhkan waktu lebih lama atau dalam jangka panjang.

### 3.7. Komparasi Biaya Sertifikasi

Subbab ini membahas mengenai komparasi dari biaya sertifikasi SNI dan pelabelan Batik *Mark*. Rincian biaya sertifikasi SNI ditampilkan pada Tabel 2. Sedangkan, rincian biaya pelabelan *batikmark* ditampilkan pada Tabel 3.

**Tabel 2.** Biaya Sertifikasi SNI

<b>Biaya Sertifikasi SNI</b>			
<b>Dokumen Persyaratan</b>	<b>Biaya</b>	<b>Lembaga</b>	
Permohonan	Rp 500.000		
<i>Audit Stage I</i>	Rp 1.000.000		
<i>Audit Stage II</i>			
<i>Lead Author (LA) Per Orang/hari</i>	Rp 2.000.000		
Auditor (A) Per Orang/hari	Rp 1.500.000		
Tenaga Ahli (TA) Per Orang/hari	Rp 1.500.000		
Petugas Pengambil Contoh (PPC) Per Orang/hari	Rp 1.000.000	LSPro	
<b>Jasa Proses Sertifikasi</b>			
Panitia Teknis	Rp 300.000		
Panitia Penilaian	Rp 1.000.000		
Proses Sertifikasi (per SNI)	Rp 2.000.000		
Jasa Perdiem Untuk LA, A, TA, PPC	Rp 800.000		
Biaya Pengujian Kesesuaian Batik	Rp 410.000		
Sertifikat Merek/Surat Bukti Pendaftaran Merek	Rp 2.000.000	UMKM	
<b>Total Biaya</b>	Rp 14.010.000		

**Tabel 3.** Biaya Pelabelan *Batikmark*

<b>Biaya Pelabelan <i>Batik Mark</i></b>			
<b>No</b>	<b>Rincian</b>	<b>Biaya</b>	
<b>1</b>	<b>Biaya Administrasi &amp; Evaluasi (3 Tahun)</b>		
a	Biaya Administrasi	Rp	500.000
b	Biaya Evaluasi	Rp	600.000
c	Biaya Sertifikat	Rp	35.000
<b>2</b>	<b>Biaya Pengujian &amp; Sampel</b>		
<b>A. Pengujian dan Preparasi</b>			
a	Ciri Batik (1 Jenis)	Rp	20.000
b	Dimensi :		
	Panjang	Rp	20.000
	Tebal	Rp	25.000
	Lebar	Rp	20.000
c	Tahan Luntur Warna Terhadap :		
	Pencucian	Rp	75.000
	Gosok Kering dan Basah	Rp	60.000
d	Perubahan Setelah Pencucian	Rp	80.000
	<b>B. Laporan Hasil Uji</b>	Rp	15.000
<b>3</b>	<b>Biaya Petugas Pengambil Contoh/orang/hari</b>	Rp	250.000
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp</b>	<b>1.700.000</b>

Berdasarkan pada tabel biaya sertifikasi SNI oleh LSPro dan UMKM didapatkan total biaya dari sertifikasi SNI Batik sebesar Rp 14.010.000,00. Sedangkan, total biaya pelabelan *batikmark* yang diambil dari Balai Besar Kerajinan dan Batik pada Kementerian Perindustrian tahun 2016 didapatkan total biaya pelabelan *batikmark* pada IKM Batik sebesar Rp 1.700.000,00. Sehingga, didapatkan perbedaan biaya sertifikasi yang cukup signifikan.

**Tabel 4.** Kelebihan Sertifikasi SNI dan Pelabelan *Batikmark*

Kelebihan Sertifikasi	
Sertifikasi SNI	Pelabelan <i>Batik Mark</i>
Membendung produk sejenis dari luar negeri	Sebagai identitas dan ciri batik dari Indonesia
Meningkatkan daya saing di era perdagangan bebas	Memberikan jaminan mutu batik Indonesia
Meningkatkan kepercayaan konsumen	Menciptakan identitas batik
Dapat bersaing ke dalam pasar internasional	Sarana promosi di pasar internasional
	Meningkatkan kepercayaan konsumen

**Tabel 5.** Kesulitan IKM dalam Proses Pelaksanaan Sertifikasi

Kesulitan IKM	
Sertifikasi SNI	Pelabelan <i>Batik Mark</i>
Proses yang cukup panjang untuk pengajuan SNI (Proses bisa 1 tahun lebih)	Pembuatan akun OSS untuk pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha)
Biaya yang cukup mahal (>10 juta)	Label <i>Batikmark</i> berlaku tiga tahun dan pemilik label wajib melapor secara berkala, yakni setiap terjual 100 lembar untuk batik tulis

Berdasarkan analisis dan komparasi yang telah dilakukan, masing – masing sertifikasi memiliki tujuan yang berbeda yaitu pada sertifikasi SNI lebih mengarah kepada pemberlakuan suatu sertifikasi untuk membendung produk tiruan sejenis dari luar negeri dan mampu meningkatkan persaingan dalam ASEAN pada khususnya, sedangkan untuk pelabelan *batkmark* lebih mengarah kepada suatu identitas dan ciri batik dari Indonesia, yang diharapkan dapat menciptakan identitas batik Indonesia sekaligus memberikan jaminan mutu batik Indonesia.

Sehingga, dari analisis kelebihan masing – masing sertifikasi dan juga kesulitan IKM dalam proses pelaksanaan sertifikasi, maka kedua sertifikasi tersebut dapat dilakukan oleh Batik Pando dengan rincian dua alternatif. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh IKM Batik Pando, alternatif pertama yaitu alternatif jangka pendek dengan memilih pelabelan *batikmark*, karena dengan keadaan pandemi ini

### 3.8. Analisis Kelebihan Sertifikasi

Subbab ini membahas mengenai analisis kelebihan dan kesulitan dari sertifikasi SNI dan pelabelan Batik *Mark*. Kelebihan dari kedua sertifikasi ditampilkan pada Tabel 4. Sedangkan, untuk kesulitan dari kedua sertifikasi tersebut ditampilkan pada Tabel 5.

sertifikasi tersebut memiliki potensial yang dapat terakomodasi oleh IKM. Sedangkan, alternatif kedua yaitu alternatif jangka panjang dengan memilih sertifikasi SNI apabila IKM Batik Pando ingin meningkatkan penjualan produk ke level global, karena sertifikasi tersebut membutuhkan cukup banyak waktu dalam pemenuhan persyaratannya dan sertifikasi SNI juga membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah lainnya.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan perbandingan atau komparasi dari kedua sertifikasi. Terdapat dua komparasi yaitu komparasi syarat sertifikasi dan komparasi biaya sertifikasi.

Penelitian ini juga menghasilkan analisis bahwa pada masing – masing sertifikasi memiliki tujuan yang berbeda yaitu pada sertifikasi SNI lebih mengarah kepada pemberlakuan suatu sertifikasi untuk

membendung produk tiruan sejenis dari luar negeri dan mampu meningkatkan persaingan dalam ASEAN, sedangkan pada pelabelan Batik *Mark* memiliki tujuan yaitu sebagai identitas dan ciri batik Indonesia. Didapatkan kesimpulan bahwa kedua jenis sertifikasi tersebut sangat direkomendasikan untuk IKM Batik. Sehingga dihasilkan dua pilihan alternatif dimana alternatif jangka pendek dengan menerapkan pelabelan Batik *Mark* dengan latar belakang kondisi pandemi pada saat ini dan alternatif jangka panjang dengan menerapkan SNI Batik untuk meningkatkan penjaminan mutu produksi batik dan juga dapat meningkatkan penjualan produk pada level global.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak IKM Batik Pandono yang telah membantu keberlangsungan penelitian ini dengan bersedia dijadikan objek penelitian. Selain itu, saya ucapkan terima kasih juga terhadap pihak – pihak yang telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian berjalan dengan lancar. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca.

### Daftar Pustaka

- Alhusain, Achmad Sani. (2015). Kendala dan Upaya Pengembangan Industri Batik di Surakarta Menuju Standardisasi. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2: 199 – 213.
- Fahma, Fakhrina., dkk Esmaeilian. (2019). Penilaian Kesiapan UKM Batik dalam Sertifikasi SNI (Studi Kasus: UKM Batik di Surakarta). *Jurnal Standardisasi*, Vol. 21, No. 1.
- Meylani, Susanty, A., & Rinawati, D. I. (2012). Penilaian Kesiapan UKM Batik Dalam Menerapkan SNI Batik (Studi Kasus: UKM Batik Solo dan Yogyakarta). *Industrial Engineering Online Journal*, Vol. 1, No. 4.
- Perwitasari Y, dkk. (2019). Perencanaan Strategi Pengembangan SNI Berdasarkan Neraca Perdagangan, Standar Nasional, Struktur Industri Menggunakan Metode Analisis SWOT. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri (2019)*, Vol. 18, No. 2: 113-124.
- Sari, Indah Purnama., dkk. (2019). Urgensi *Batikmark* dalam Menjawab Permasalahan Batik Indonesia (Studi Kasus di Sentra Batik Tanjung Bumi). *Jurnal Sosio e-kons*, Vol. 11, No.1.
- Setiawan, Joni., dkk. (2018). Kesesuaian Batik Tulis IKM Berdasarkan SNI 08-0513-1989. *Jurnal Standardisasi*. Vol. 20, No. 1.
- Sholikhah, Imroatus., dkk. (2020). Industri Kreatif pada Batik Tulis Tenun Gedog: Kondisi Sosial-Ekonomi Pasca Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 03, No. 01.
- Sumarta, Nurmadi Harsa., dkk. (2021). Pedampingan Pengajuan Relaksasi Kredit pada UMKM Terdampak Covid-19 di Kelurahan Kauman, Surakarta. *Jurnal Budimas*, Vol. 03, No.01.
- Utomo, Priyo., Dona Budi Kharisma. (2019). Implementasi Standardisasi Batik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kota Yogyakarta. *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, No. 2.